

PERAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

The Role of Village Apparatus in Increasing Political Participation of The Community

Ade Hermawan^{1*}
Muhammad Jamili¹
Bakhtiar¹
Singih Priono¹

¹STIA Bina Banua, Banjarmasin

*email: stiabb08@gmail.com

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat turut menentukan pembangunan negara melalui keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum. Perguruan Tinggi selaku penyelenggara pendidikan termasuk di dalamnya STIA Bina Banua Banjarmasin perlu melaksanakan suatu program berupa pengabdian kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini berupa pelaksanaan Penyuluhan Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Desa di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga. Selain Penyuluhan yang berkaitan dengan kepemiluan, dilakukan pula kerjasama mitra berkenaan dengan konsultasi dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi Desa. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah selain penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di desa serta memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa. Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah survei, dokumentasi, dan ceramah. Kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik dan lancar dan peserta memahami mengenai cara mendaftar kuliah di perguruan tinggi.

Abstract

Community political participation also determines national development through community involvement in organizing general elections. Universities as education providers including STIA Bina Banua Banjarmasin need to implement a program in the form of community service. The purpose of this activity is to implement Counseling Related to the Implementation of the 2024 General Election for Village Apparatus in Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The aim is to provide political education for the community in order to increase awareness and political participation of citizens. In addition to counseling related to elections, partner collaboration is also carried out regarding consultation and assistance for problems faced by the Village. The benefits of implementing this activity are in addition to the application of science in real life in the community, to train the ability to solve problems of community life in the village and provide opportunities for community service participants to inventory problems and potential in the village. The methods used in implementing community service activities are surveys, documentation, and lectures. The counseling activities went well and smoothly and participants understood how to register for college at a university.

Kata Kunci:

Aparatur desa
Partisipasi politik
Masyarakat.

Keywords:

Village apparatus
Political participation
Community



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 24-09-2024

Accepted: 19-10-2024

Published: 23-10-2024

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta dalam pemerintahan dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial bernegara, semuanya sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak

berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara di dalamnya. Adapun miniatur dari pemerintahan negara adalah pemerintahan desa, dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga pemerintah mempunyai perhatian khusus terhadap pemerintahan desa terbukti atas disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mempunyai paradigma baru bahwa perubahan baik ekonomi, pembangunan, dan kebijakan politik bukan hanya dari kota saja, akan tetapi membangun Indonesia harus mulai dari Desa.

Menurut Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan (2020) Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia mulai dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Pilkada, dan pemilu legislatif secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi. Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk kepala desa.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang

rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Pada hakikatnya Partisipasi politik adalah tindakan suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih, sebab merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran- saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.

Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Pemilu juga adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang

untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya, Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri harus jujur dan adil, di samping itu Pemilu harus didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Menurut Budiarto (2008) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut andil secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih kepala negara dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik merupakan hal yang sangat fundamental bagi Indonesia, karena masyarakat yang ikut secara aktif dan andil dalam Partisipasi politik tersebut sehingga menghasilkan suatu hal yang menyejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari. Ketika pemimpin yang dipilih hanya mengutamakan kepentingan diri dan golongannya sendiri, buah dari partisipasi politik masyarakat ini justru dapat menyengsarakan dan membuat sulit kehidupan bernegara dikemudian hari.

Aparatur desa menjadi wadah aspirasi masyarakat daerah setempat untuk kebaikan serta kepentingan daerahnya itu sendiri. Selain sebagai wadah aspirasi, aparatur desa wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, karena jalannya suatu desa adalah hasil dari kinerja aparatur desa itu sendiri. Aparatur desa ini terdiri kepala desa, sekretaris desa serta jajaran kepala urusan baik itu urusan umum, urusan keuangan dan urusan pemerintahan serta pelayanan. Selain menjadi wadah aspirasi masyarakat desa serta sebagai penggerak pemerintahan di desa itu sendiri, setiap aparatur desa harus melaksanakan pengajaran berupa pentingnya ikut berpartisipasi dalam setiap memilih bakal calon kepala desa ke depannya.

Sehingga pengajaran serta sosialisasi yang dilakukan aparatur desa bisa menambah minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 yang berbunyi “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”. Menurut AR. Mendrofa (2021) Korelasi Aparatur Desa dengan Partisipasi Politik adalah selaras dengan konsep demokrasi. Yang dimana demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi politik adalah usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang ikut andil secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya yaitu berpartisipasi dalam politik, jadi partisipasi politik akan berjalan dengan sebagaimana mestinya jika partisipasi yang dilakukan oleh rakyat dalam hal ini masyarakat memiliki keinginan untuk mengikuti. Semakin peran yang dilaksanakan Aparatur Desa untuk meningkatkan Partisipasi Politik dilakukan dengan baik, maka output yang dihasilkan adalah meningkatnya jumlah partisipan yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

STIA Bina Banua Banjarmasin dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil yang diselenggarakan tahun 2024. Sangatlah penting manakala peran-peran strategis

tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.

Tujuan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STIA Bina Banua Banjarmasin adalah : Melaksanakan peran Perguruan Tinggi dalam membantu penguatan pemerintah desa melalui penyuluhan Kepemiluan dan Partisipasi Politik Masyarakat. Sebagai pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat. Dan Terciptanya kemitraan antara STIA Bina Banua Banjarmasin dengan Pemerintah Desa secara khusus, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kerja sama dengan mitra ini sehubungan dengan pendampingan terhadap organisasi kepemudaan.

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini: Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat, Memberi sumbangsih pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat khususnya untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya, Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi daerah guna menunjang kegiatan penelitian.

METODE PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan Penyuluhan Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat meliputi:

I. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan atau sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan adalah:

- a. Membuat proposal kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b. Menerima penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari STIA Bina Banua Banjarmasin.

- c. Mengirimkan surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

2. Menerima konfirmasi kesediaan dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari pihak Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut

3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah :

- a. Tim pengabdian pada masyarakat pergi ke Kantor Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan membawa peralatan sosialisasi.
- b. Tim pengabdian pada masyarakat menghadap pada Camat atau yang mewakili untuk memohon izin melakukan sosialisasi.
- c. Tim melakukan sosialisasi mengenai materi Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada aparatur Desa sesuai tempat dan waktu yang telah dialokasikan oleh pihak Kantor Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

4. Tahap Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pembuatan laporan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Kantor Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut:

- a. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti surat permohonan kegiatan pengabdian masyarakat, surat konfirmasi kesediaan menerima kegiatan pengabdian masyarakat, foto-foto kegiatan sosialisasi, daftar hadir peserta sosialisasi, surat

keterangan telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

- b. Mengolah data-data hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. Membuat laporan hasil kegiatan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- d. Mempublikasikan laporan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat.



Gambar 3. Penyuluhan pada Para Aparatur Desa Kecamatan Kurau

Metode Penyuluhan Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah:

1. Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.



Gambar 1. Penyuluhan pada Para Aparatur Desa Kecamatan Bati-Bati



Gambar 2. Penyuluhan pada Para Aparatur Desa Kecamatan Tambang Ulang

2. Metode Tanya Jawab

Tanya jawab sangat penting bagi para peserta

penyuluhan, baik saat mendapatkan penjelasan tentang cara meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa. Metode ini memungkinkan peserta workshop untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan pemilihan umum.

3. Metode Simulasi

Simulasi ini sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada peserta workshop untuk mempraktekkan materi yang diperoleh. Diharapkan para peserta workshop benar-benar menguasai materi yang diterima, mengetahui cara meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim dosen dengan didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIA Bina Banua Banjarmasin. Peserta penyuluhan adalah aparatur desa di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.. Kegiatan dimulai pukul 09.00 – 12.00 Wita, dalam suasana kekeluargaan dan penuh antusias dari peserta penyuluhan.

Penyuluhan bertemakan “Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat” diawali dengan diskusi singkat mengenai bagaimana para aparatur desa berusaha meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilu. Peserta penyuluhan menanggapi antusias dan mengaku berniat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu kelak. Bahkan peserta tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan analisis tahap awal pengetahuan peserta terhadap cara meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, sebagian besar peserta sudah mengetahui tentang cara meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Memang kebanyakan peserta sudah mendengar informasi mengenai pentingnya partisipasi aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa, namun mereka rata-rata belum mengetahui secara detail dan teknis mengenai cara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Setelah memperoleh kesimpulan awal, kemudian penyuluhan Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disampaikan oleh narasumber. Penyampaian materi diawali dengan meminta masing-masing peserta untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Terdapat peserta yang masih bingung sehingga belum bisa menentukan dan memilih program kegiatan yang akan dipilihnya. Oleh karena itu, penyuluh memberikan gambaran dan penjelasan mengenai berbagai program kegiatan yang dapat dilakukan oleh aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Selanjutnya peserta diajarkan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Sesi terakhir dari kegiatan penyuluhan ini adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan yang disampaikan oleh peserta lebih fokus pada bagaimana persiapan yang dapat dilakukan para aparatur desa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Dan bagaimana gambaran pelaksanaan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Peserta terlihat antusias dan merasa sangat terbantu. Keseluruhan pertanyaan tersebut dijawab oleh para narasumber dengan baik.

Para aparatur desa di kecamatan Bati-Bati merasa senang dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Fenomena ini menjadi salah satu alasan penyuluhan ini menjadi sangat bermanfaat bagi mereka. Selama ini para aparatur desa hanya dapat informasi dari media sosial.

RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah para aparatur desa di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut menerima materi tentang Peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diharapkan mereka dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari kegiatan penyuluhan ini sebagai bekal untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di wilayahnya.

Kemudian Tim dosen dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIA Bina Banua Banjarmasin akan melakukan kunjungan ke desa-desa di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk memantau partisipasi politik masyarakat dalam pada saat pelaksanaan pemilu.

KESIMPULAN

Demikian Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi para aparaturnya di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Bagi STIA Bina Banua Banjarmasin, serta bagi dosen STIA Bina Banua Banjarmasin.

Kami berharap, karena kegiatan ini merupakan kontribusi dosen bagi kemajuan STIA Bina Banua Banjarmasin (khususnya untuk kepentingan akreditasi), maka sudah sewajarnya pihak Yayasan Pendidikan Bina Banua Banjarmasin untuk membantu pembiayaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIA Bina Banua Banjarmasin atas dukungan untuk kegiatan penyuluhan ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Bati-Bati, Camat Tambang Ulang, dan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan izin dalam penyelenggaraan acara penyuluhan serta menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.

REFERENSI

- AR. Mendrofa, 2021. <https://refository.uhn.ac.id>, Universitas HKBP Nommensen.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiarjo, Miriam. (1992). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Juliantara, Dadang.
- (1998). *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, *Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang*, Jurnal Suara Hukum, Volume 2 No. 1 Maret 2020.
- Miharni Tjokrosaputro, 2021. *Prosiding Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021*.
- Nuvazria Achir, Moh. Hidayat Muhtar. *Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna dalam Memaksimalkan Praktik Politik dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone*. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.